





LOCAL CONTENT SHARING SESSION









SUCOFINDO Profile

SUCOFINDO Profile



History

Sucofindo has been founded since 1956, with a cooperation relationship between the Indonesian government and SGS, Geneva, Switzerland.

Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) officially declared joining the Holding survey Industries called ID Survey. Having 3 members with PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) as leader and PT. Survey Indonesia (PT. SI) as member.

Stakeholders

- 1. Seri A (Dwiwarna) NRI
- 2. Seri B PT BKI (Persero) dan SGS

Vision

In becoming a competitive, reliable, and trusted worldclass company leading in inspection, testing, certification, consultancy, and training.

Mision

To assure certainty, provide economic value to stakeholders, consumers, shareholders, and workers through inspection, testing, certification, consultation, and other relevant services.

COMPETENCE SUCOFINDO











Consultation

Training

Employees

3.500

Total Services

194

Consumen

13.800

Unit Services

- 80 Unit Services
- 65 Laboratorium

SUCOFINDO SERVICE POINT

Corporate Values

- 1. Amanah (Trust)
- 2. Kompeten (Competence)
- 3. Harmonis (harmonic)
- 4. Loyal (loyal)
- 5. Adaptif (adaptive)
- 6. Kolaboratif (Colaborative)

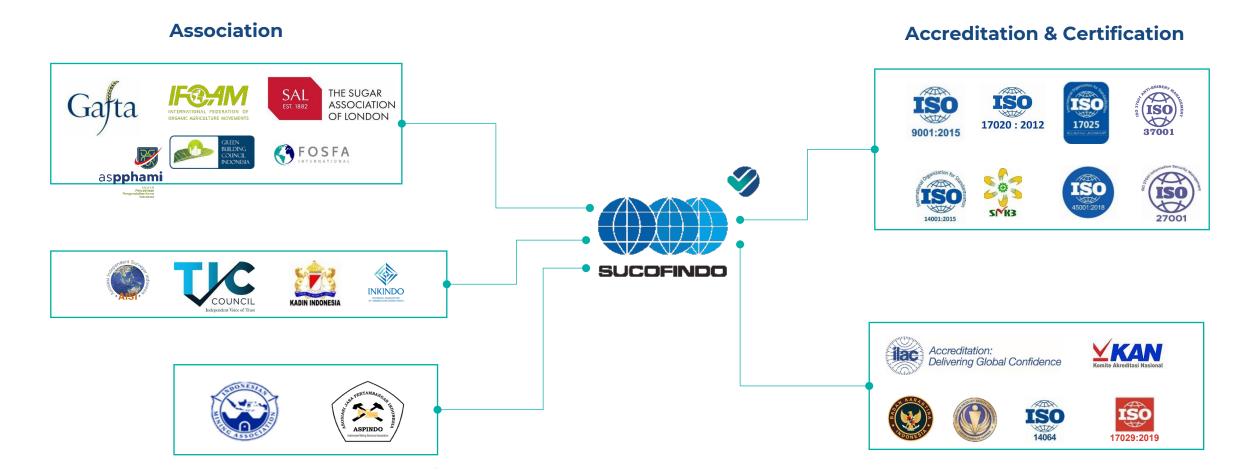








MEMBERSHIP (ASSOCIATION, ACCREDITATION & CERTIFICATION)







SUCOFINDO

ASSIGNMENT



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4058 TAHUN 2023 TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA VERIFIKASI INDEPENDEN PELAKSANA PENGHITUNGAN DAN VERIFIKASI BESARAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DAN NILAI BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melakukan penghitungan dan verifikasi besaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan, perlu menunjuk Lembaga Verifikasi Independen;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Administratif dalam rangka Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan, Lembaga Verifikasi Independen sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditunjuk oleh Menteri berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Nomor 82/SJ-IND/IND/IV/2023 tanggal 10 April 2023 telah dilakukan penilaian terhadap calon Lembaga Verifikasi Independen oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen pelaksana penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

-2-

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Rangka Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 983);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA VERIFIKASI INDEPENDEN PELAKSANA PENGHITUNGAN DAN VERIFIKASI BESARAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DAN NILAI BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN.

KESATU : Menunjuk:

PT Superintending Company of Indonesia. sebagai Lembaga Verifikasi Independen Pelaksana Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan, yang selanjutnya disebut Lembaga Verifikasi Independen.

KEDUA

- : Lembaga Verifikasi Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan penghitungan dan verifikasi besaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- b. menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan penghitungan dan verifikasi besaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.







ISO17029 – Local Content Verification and Validation Scope



LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LVV-010-IDN

LEMBAGA VALIDASI DAN/ATAU VERIFIKASI - SNI ISO/IEC 17029:2019 (ISO/IEC 17029:2019)

Nama Lembaga Inspeksi : PT Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) - SBU Perdagangan, Industri dan Kelautan

: Graha Sucofindo, Jl. Raya Pasar Minggu, Kav. 34, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Telp.: (021) 7983666 Email: fkl.pik@sucofindo.co.id

26 Juni 2024 25 Juni 2029

Masa Berlaku

Lokasi

Kantor Pusat Graha Sucofindo, Jl. Raya Pasar Minggu, Kav. 34, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Cabang Jakarta Jl. Cumi No.33-35, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta Cabang Semarang Jl. Pemuda No.171, Sekayu, Semarang Tengah, Jawa Tengah Cabang Medan Jl. Jendral Gatot Subroto Km. 5.5 No. 105, Medan, Sumatra Utara

Cabang Balikpapan : Jl. Ahmad Yani No.1, Gunungsari Ulu, Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur

Cabang Bekasi Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat

Cabang Lampung Jl. Gatot Subroto No.161, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, Lampung

Cabang Bandung Jl. Soekarno Hatta No. 217, Bandung, Jawa Barat

Cabang Surabaya Jl. Kalibutuh No.215, Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur Cabang Pontianak Jl. Adisucipto KM.12.9, Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat Cabang Batam Jl. Raden Patah No. 61, Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau

Ruang Lingkup Akreditasi

- Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- Verifikasi Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)

1 dari 1



KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Jakarta, 26 Juni 2024

: 740/3.a2/LIS/06/2024 Lampiran · 1 (satu) berkas Keputusan Akreditasi

Yth. Pimpinan PT Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) - SBU Perdagangan, Industri dan Kelautan Graha Sucofindo, Jl. Raya Pasar

Minggu, Kav. 34, Jakarta Selatan.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 26 Juni 2024, Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah memutuskan untuk memberikan akreditasi kepada PT Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) - SBU Perdagangan, Industri dan Kelautan sebagai lembaga yalidasi dan/atau yerifikasi dengan nomor akreditasi LVV-010-IDN sesuai ruang lingkup terlampir

Selanjutnya kepada PT Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) - SBU Perdagangan, Industri dan Kelautan diberikan hak untuk menggunakan Simbol Akreditasi KAN sesuai dengan yang diatur di dalam KAN U-03 tentang Penggunaan Simbol Akreditasi KAN dan KAN U-01 tentang Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Masa akreditasi berlaku 5 (lima) tahun dari tanggal keputusan akreditasi. Kunjungan surveilen pertama akan dijadwalkan antara bulan ke-15 sampai bulan ke-18 sejak tanggal akreditasi, sedangkan surveilen kedua dijadwalkan antara bulan ke-36 sampai bulan ke-39 sejak tanggal ditetapkan akreditasi. Asesmen lapangan dalam rangka reakreditasi akan dijadwalkan paling lambat pada bulan ke-54 sejak ditetapkan tanggal akreditasi, sedangkan penyerahan permohonan dan dokumen pendukung lainnya dilaksanakan paling lambat pada bulan ke-48 sejak tanggal ditetapkan akreditasi.

Perlu kami sampaikan bahwa penerbitan sertifikat dan lampiran sertifikat akreditasi yang memuat ruang lingkup akreditasi sedang dalam proses dan akan kami informasikan kemudian

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Komite Akreditasi Nasional Plt. Deputi Bidang Akreditasi BSN selaku Sekretaris KAN,



国が製造に見 Columno in teleb direndatenge: энгэгч өдийлгийн ганаддагынын Sectional Fleetrank yang ditertancen USAL

Donny Purnomo NIP. 197501152000031001

Komite Aleed to: Nacional J. Kuninger serat Yeys, No CIA, Kuninger, Memberg Frasetar bland Pelatan, FKI Jakama, Indonesia Dunktural Abraciles i Laminga Inspecs con Laminga Santificaci 192512 1314 0054 Direktoryat Akresitzeri Laboratorikus +02813 8363 6909

Signatory of APAIC MPALICAS MRA and IAF MLA



6







Local Content Verfiication Goods and Services (Monitoring dan Post Audit)

Local Content Pre Assesment (TKDN)

SOP Guidelines on Procurement of Goods and Services

Procurement Planning Consultancy



Local Content Roadmap Guideline

Local Content Training & sharing knowledge

Other Services







EXPERIENCES

Sector	Job Description
Industri (Kementerian Perindustrian) & Manufacturer Kemenhan dll)	Local Content Verification for Goods > 30,000 Certificates
BUMD (Pasar Jaya, JIEP, KBN)	Local Content Training, Local Content Verification
Hulu Migas (Pertamina, Medco, ExxonMobil, BP Berau, INPEX, ENI, Chevron dll)	Preparation of Local Content Data Base, Local Content Verification (Monitoring and Post Audit), Socialization/Local Content Training, Pre-Assessment
BUMN (KPI, Patra Niaga, Pertamina (Persero), Antam)	Local Content Verification (Monitoring and Post Audit), Local Content Upskilling
Minerba (Ditjen Minerba, PT Antam, dll)	Local Content Verification, Preparation of Local Content Data Base, Internal Training for Company and Vendor
EBTKE (Ditjen EBTKE, Geodipa, SAKA energy)	Local Content Verification, masterlist (RIB), Road Map Preparation
Perhubungan (Garuda Indonesia, Pelita Air, Pelindo)	Local Content Verification, Socialization/Local Content Training, Preparation of Local Content Data Base, Local Content Standard Operating Procedure
Perbankan (Bank Mandiri, BRI, BNI)	Socialization and Local Content Training
Ketenagalistrikan (Kementerian ESDM (DJK), PLN, Indonesia Power, Cirebon Electic Prasarana dll)	Optimalization, Local Content Training, masterlist (RIB), Road Map Preparation
Pemprov dan Pemkot (Sumsel, Sumbar, Kaltim, Sorong, Garut)	P3DN Team, Socialization/Local Content Training, Local Content Certification Assistance for Small Industry
Kominfo (Kementerian Kominfo, PT Telkom, XL, Indosat, Lintas Arta dll)	Assessment of CAPEX and OPEX







9

LEGAL ASPECT







LEGAL **ASPECT**

Clause 54

P3DN

Empowerment of Local Industry

Timnas P3DN

Clause

73

(State in Keppres 24/2018)

Clause 74

P3DN Team

Clause

57

Formed in every K/LN, LPNK, SKPD **Sanction**

Clause

60

Administrative and **Financial Sanction**

Clause 106-110 **Sanction Implementation**

Verificator, Company, & Provider/Manufacturer

Mandatory Domestic Product

K/L/PD

- 1. APBN/APBD
- 2. Loan/Grant

BUMN/BUMD/Swasta

- 1. APBN/APBD
- 2. Collaboration with Government
- 3. Manage resources that owned by Goverment

Local Product Procurement

- Goods
- Services
- Combine of Goods and/or Services

Government Support

Clause

76

- Price Preference for Local Product if the value of Local Content ≥ 25%
- Price Preference for Goods is 25% maximum
- Price Preference for Construction Services by Domestic Company is 7,5% maximum

Clause

58

The Use of Local Product

Local Product must be used in the planning and preparation work stage

Local Content (TKDN)

Mandatory to use domestic products if there are domestic products with Local Content & BMP value 40% minimum. (With Local Content value at least 25%)

Minister of Industry establishes:

- Inventory List for Goods/Services
- Local Content minimum value for specific industries

Clause 61

Clause

64







APPLICATION OF LOCAL CONTENT IN PROCUREMENT







12

LKPP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 "PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA"



Planning

- · Paying attention to Local Content when identifying needs & determining goods/services (Is Local Content Required?)
- Looking for goods/services Local Content value.
- Goods → Inventory List of Goods;
- Services → Estimate Calculations
- Calculate Local Content value target that will be determined

Preparation

- Spec Compilation, Temporary Bid Price & Contract Document
- Ensure the target of Local Content value (Based on **Inventory List & Estimate** Calculations)
- State Local Content requirements on Tender Document

Tender

- Evaluating Tender Document
- Reviewing Local Content supporting documents, Inventory List, Calculating the value of goods and/or services local content, calculating the price preference
- · Proposing an offer for goods local content; Services Local Content Commitment; Combine of Goods and/or Services

Work Implementation

- · Performing work in accordance with the proposal. (Goods Local Content & Services Local Content Commitment)
- Monitoring each stages of work (Record any noncompliance work; Collect documents and evidence to calculate Local Content value)

Hand Over

- Deliver the work based on the contract
- Evaluating Local Content Achievement vs Local Content Commitment)
- Determine penalties for any non-compliance work
- Supervise & Monitoring







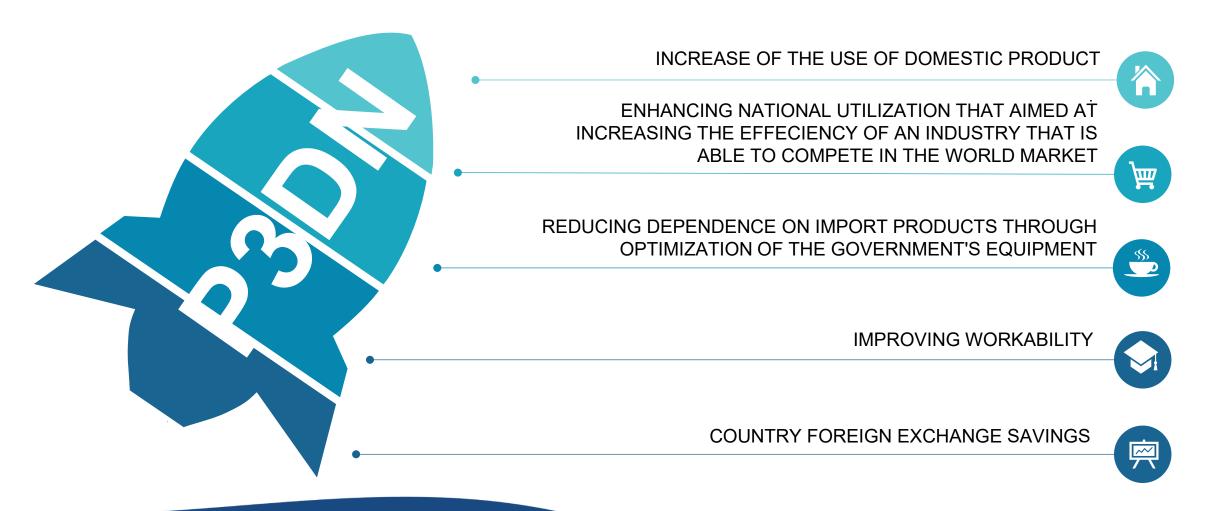
LOCAL CONTENT BASIC CONCEPT







OBJECTIVES OF STRENGTHENING THE USE OF DOMESTIC PRODUCT









15

LOCAL CONTENT BASIC CONCEPT

Local Purchased



Local Product











LOCAL CONTENT?

The percentage of local content or local contribution in a domestic product/service.

LOCAL PRODUCT?

Goods or Services, including construction and construction designs, which are produced or manufactured by a company that invests and produces in Indonesia, using all or part of the labour force of the citizens of the State of Indonesia, and processing using raw materials or components whose whole or part originate from the country.







LOCAL CONTENT BASIC CONCEPT



INVEST IN INDONESIA



LOCATED IN INDONESIA



PERFORM PRODUCTION IN INDONESIA



Higher Economic Value

Goods/ Products

- Characteristic
- Form
- Function

Change of Form

Local

Foreign

Material & Personnel









DEFINITION	CHARACTERISTIC
Goods (materials or equipment) in a whole or disintegrated form that have specific functions and forms.	Local content achievement in a single product or goods, or multiple products or goods.
Professional services to achieve specific goals whose final result is not in the form of goods that can be used directly.	Local Content achievement in a single services .
Work in which technical planning, specification determination and supervision of implementation are carried out by the User, while the entire process and work including the provision of labor, equipment and materials required are carried out by the Provider.	Local Content achievement in construction contract services using multiple goods and services.

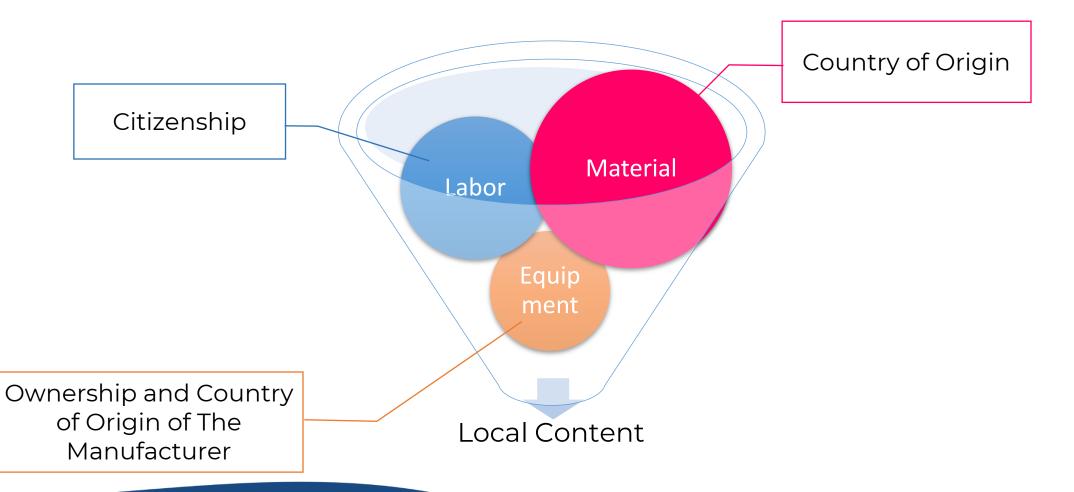






19

LOCAL CONTENT BASIC CONCEPT







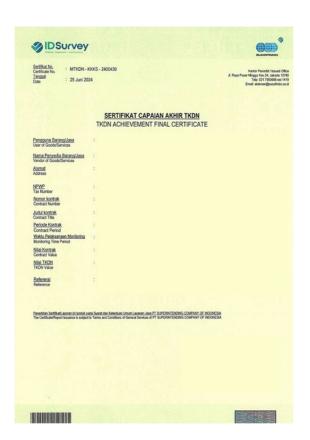


LOCAL CONTENT BASIC CONCEPT





Certificate for Goods Local Content validity period for 3 years



Certificate for Local Content Services only for one specific work







LOCAL CONTENT VERIFICATION







VERIFICATION CONCEPT

Purposes:

To ensure the realization of local content (achievement) at the end of work implementation, compared to the commitment.

Verification Concept:

Commitment

VS

Realization

VERIFICATION ON EACH STAGE OF WORK

Implementation in each of work progress

Implementation according to time period

VERIFICATION AT THE END OF WORK

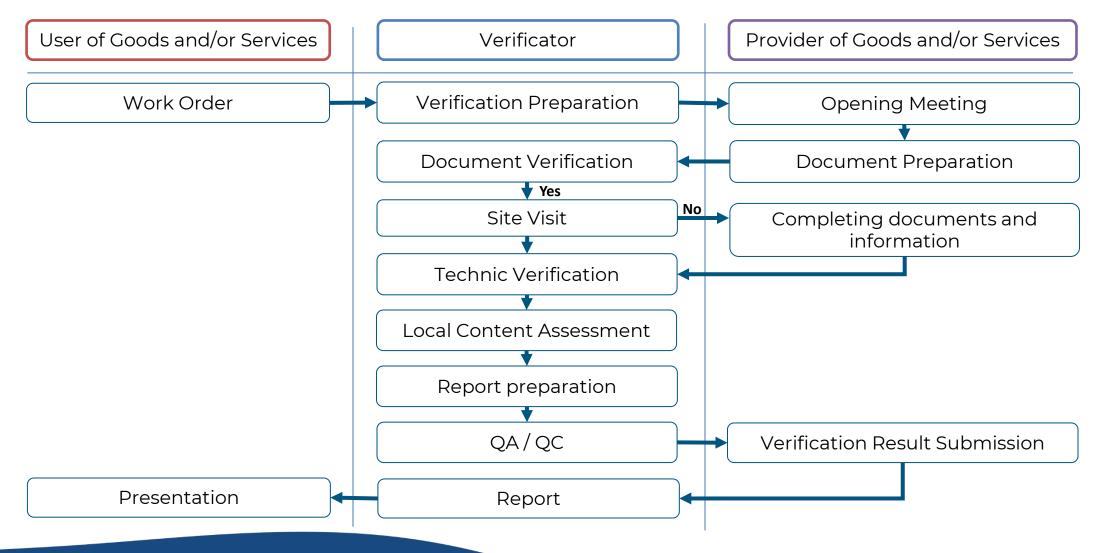
Implementation at the end of work







LOCAL CONTENT VERIFICATION

























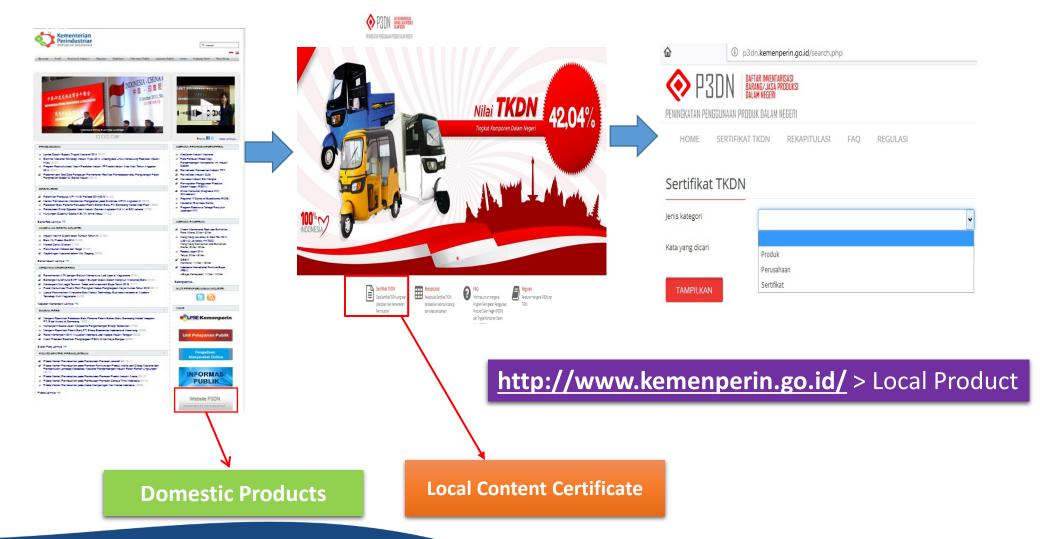


http://tkdn.kemenperin.go.id





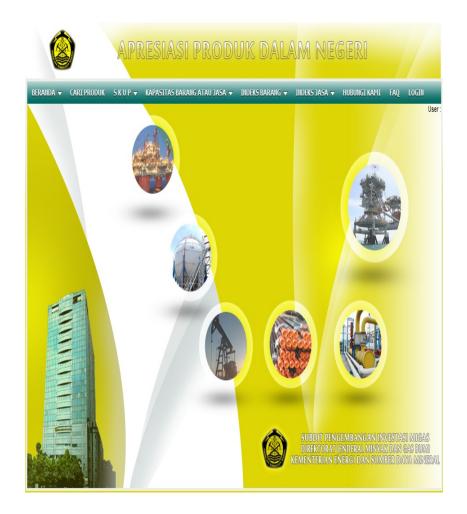


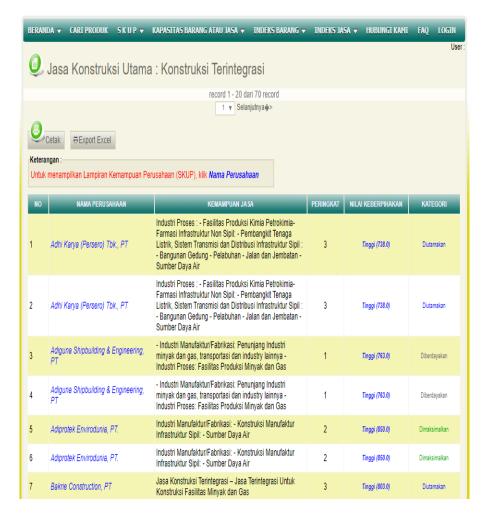










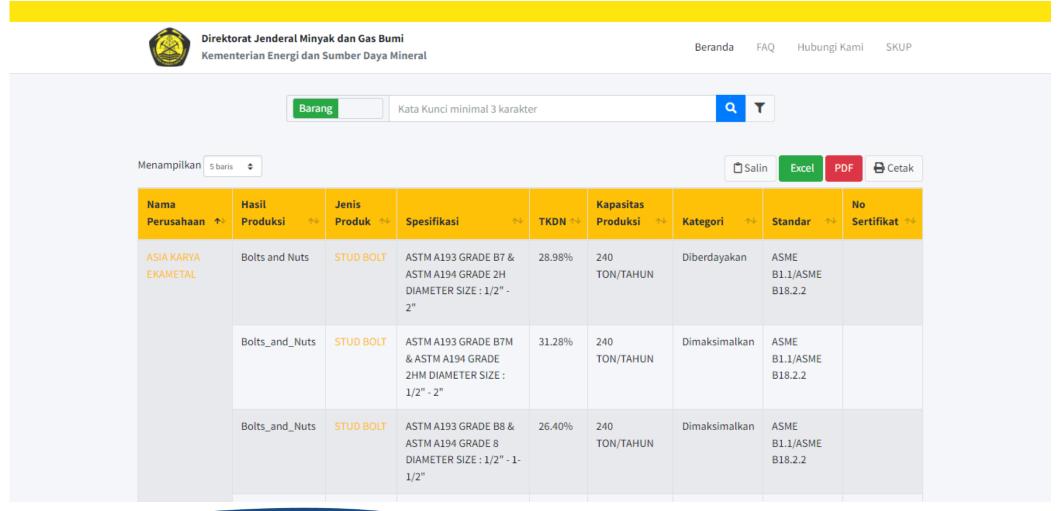


APDN DITJEN MIGAS ESDM http://203.189.89.7









https://www.esdm.go.id/apdn/









THANK YOU

PT. SUCOFINDO Graha Sucofindo, Lt. 4 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780

Telepon: (021) 7983666 Ext. 2390

Fax: (021) 7986695